

**STRATEGI PENINGKATAN KONTRIBUSI PERIKANAN
TERHADAP PERTUMBUHAN WILAYAH KABUPATEN MAMUJU**

*STRATEGY OF FISHERY CONTRIBUTION IMPROVEMENT ON
REGIONAL GROWTH OF MAMUJU REGENCY*

NASYRAH AZIZ



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

**STRATEGI PENINGKATAN KONTRIBUSI PERIKANAN
TERHADAP PERTUMBUHAN WILAYAH KABUPATEN MAMUJU**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan Pengembangan Wilayah

Disusun dan Diajukan Oleh

NASYRAH AZIZ

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

TESIS

STRATEGI PENINGKATAN KONTRIBUSI PERIKANAN TERHADAP PERTUMBUHAN WILAYAH KABUPATEN MAMUJU

Disusun dan diajukan oleh

NASYRAH AZIZ

Nomor Pokok P0204211004

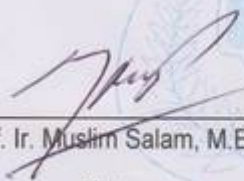
Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 20 Juni 2013

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat,



Prof. Ir. Muslim Salam, M.Ec., Ph.D

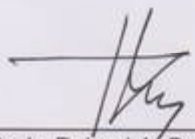
Ketua



Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA

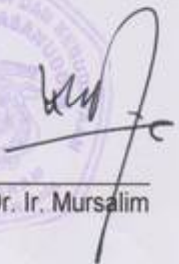
Anggota

Ketua Program Studi
Perencanaan Pengembangan
Wilayah



Dr. Ir. Roland A. Barkey

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. Mursalim

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NASYRAH AZIZ

Nomor Mahasiswa : P0204211004

Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juni 2013

Yang Menyatakan

NASYRAH AZIZ

PRAKATA



Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul "*Strategi Peningkatan Kontribusi Perikanan Terhadap Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Mamuju*". Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Ir. Muslim Salam, M. Ec., Ph.D., selaku ketua komisi penasihat dan Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA, selaku anggota komisi penasihat, dengan penuh kesabaran terus memberikan dorongan, bimbingan, dan saran serta meluangkan waktunya hingga penulisan tesis ini dapat dirampungkan.
2. Dr.Ir.Roland A Barkey, selaku Ketua Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.
3. Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, MS, dan Prof. Dr. Ir. I Made Benyamin, M.Ec, selaku tim penguji yang telah banyak memberikan koreksi dan saran untuk menjadikan tesis ini menjadi lebih bermakna.
4. Prof. Dr. Ir. Ananto Yudono, M.Eng; Prof. Dr. Ir. Shirly Wunas, DEA; Prof. Dr. Ir. Slamet Tri Sutomo, MS; Prof. Ir. Bambang Heryanto, M.Sc, Ph.D; Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D; Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, MS; Prof. Dr. Ir. Aris Baso, M.Sc; Dr. Ir. Ria Wikantari,

M.Arch, dan para dosen pengajar lainnya yang telah dengan sabar, tekun dan menransformasikan ilmunya kepada penulis, sehingga memudahkan untuk menyelesaikan tugas-tugas pendidikan dan tugas pengembangan ilmu di kemudian hari.

5. Bapak Bupati Mamuju, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan pada program Pascasarjana Unhas.
6. Kepala Dinas dan staf Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mamuju, atas bantuannya dalam memberikan dokumen-dokumen dan informasi yang penulis butuhkan.
7. Semua teman sejawat, khususnya teman-teman para mahasiswa Perencanaan dan Pengembangan Wilayah angkatan 2011 Universitas Hasanuddin: Aulia Saraswati, S.P; Didiet Haryadi Hakim, ST; Dian Asri Unga Mega, S.Pt; Irwansyah, S.Pi; Erwin Amri, ST; Muh. Arsyad, ST; Andi Hamka, S.Pt; Yospin Seni Parerung, ST, Rusneni, ST; Mutmainnah, S.S; Zulkifli Pasomba, S.Pd; Rijal Fikri, ST; Hamka Badaruddin, S.Si; Muh. Ahadismal, S.Stp; Apriany Thahir, S.Stp; Sudy Suryana, ST; Andi Ashim, ST, yang telah memberikan semangat belajar, berbagi suka dan duka, dan dorongan untuk maju bersama.
8. R.W. Atmaja, ST, terima kasih atas bantuan, doa dan motivasinya dalam penyelesaian tesis ini.
9. Akhirnya tesis ini penulis persembahkan kepada segenap keluarga dan saudara-saudara penulis, terutama buat orang tuaku tercinta ibunda Hj. Nurniah Jasa dan ayahanda Abd. Aziz Derita (alm.), yang

penyuh rasa kasih sayang telah membesarkan, mendidik dengan penyuh rasa tanggungjawab dan senantiasa mendoakan penulis, yang telah mempersembahkan segala-segalanya buat ananda mulai dari proses perkuliahan hingga rampungnya tesis ini. Darinya penulis belajar tentang hidup dan kehidupan serta tanggungjawab hingga tiada untaian kalimat yang dapat mewakili rasa terima kasihku.

10. Semua pihak yang belum tercantum namanya namun telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis tidak dapat membalas segala bantuan Bapak/Ibu/Saudara(i), insyaAllah segala dukungan, bantuan, pengorbanan moril maupun materil mendapat pahala yang setimpal disisiNya, amin. Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, karena berbagai kendala kesibukan, waktu dan kemampuan penulis, karenanya dengan rendah hati dan lapang dada penulis sangat terbuka untuk menerima kritik, saran atau masukan yang bersifat membangun, guna perbaikan serta kesempurnaan tesis ini.

Makassar, Juni 2013

Nasyrah Aziz

ABSTRAK

NASYRAH AZIZ. *Strategi Peningkatan Kontribusi Perikanan Terhadap Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Mamuju* (dibimbing oleh Muslim Salam dan AmboTuwo).

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis posisi sektor perikanan di Kabupaten Mamuju dilihat dari tenaga kerja dan PDRB, dan (2) merumuskan strategi pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Mamuju.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif-kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diolah dan dianalisis menggunakan metode *Location Quotient (LQ)* dan *Shift Share*. Selain itu, juga digunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer dari informan terpilih. Data primer diolah dan dianalisis dengan metode SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai LQ berdasarkan indikator tenaga kerja merupakan sektor basis sementara berdasarkan PDRB merupakan sektor non basis. Untuk *Shift Share Analysis* berdasarkan indikator PDRB komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) pertumbuhannya cepat, untuk komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) mempunyai daya saing yang baik, untuk persentase pergeseran bersih (PB) termasuk ke dalam kelompok progresif (maju). Pemilihan alternatif strategi yang diprioritaskan untuk pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Mamuju, adalah melakukan pengembangan perusahaan sektor perikanan dan kelautan dengan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan, penegakan hukum yang tegas bagi yang melanggar hukum guna mencegah eksploitasi sumberdaya hayati, dan peningkatan keterampilan nelayan. Sektor perikanan dan kelautan sebagai sektor non basis berdasarkan indikator pendapatan wilayah hendaknya tetap diprioritaskan dalam pembangunan wilayah. Perlu adanya upaya yang kuat dari pemerintah Kabupaten Mamuju untuk mendorong pihak swasta atau investor agar bersedia menanamkan modalnya pada sektor perikanan dan kelautan.

Kata Kunci : Strategi peningkatan kontribusi perikanan, *Location Quotient (LQ)*, *Shift Share*.

ABSTRACT

NASYRAH AZIZ. *Strategy of fishery Contribution Improvement on Regional Growth of Mamuju Regency* (supervised by Muslim Salam and Ambo Tuwo).

The research aimed at (1) analysing the position of the fishery sector at Mamuju Regency viewed from the man power and Gross Domestic Product (GDP), and (2) formulating the strategy of the development of the fishery sector at Mamuju Regency.

The research method used in the research was a quantitative descriptive method by using the *Location Quotient (LQ)* and *Shift Share* methods. Moreover, a quantitative method was also used by exerting the primary data from the selected informants. The primary and secondary data were processed and analysed by SWOT method.

The research result indicates that the LQ value based on the man power indicator represents the basic sector, whereas GDP represents the non-basic sector. For the *Shift Share Analysis* based on the GDP indicator of the proportional Growth Component, its fast growth for the component of the Regional Segment Growth has the good competitive power, for the percentage of good shift is classified into the progressive group. The choice of the alternative strategy which focuses on the fishery and marine sector exertion by integrated and sustainable approach, the firm law enforcement for those who break the law in order to prevent the biological resource exploitation, and fishermen's skill improvement. The fishery and marine sector as the non-basis sector based on the regional revenue indicator should constantly become the focus on the regional development. It is necessary to have strong effort from the government of Mamuju Regency to urge the private sector of investors to invest their capital on the fishery and marine sector.

Keywords: *Strategy of fishery Contribution Improvement, Location Quotient (LQ), Shift Share.*

DAFTAR ISI

	halaman
PRAKATA	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Ruang Lingkup Penelitian	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Aspek Perikanan	7
B. Pembangunan Sektor Perikanan	10
C. Pengembangan Wilayah	16
D...Pertumbuhan Wilayah	22
1. Defenisi Pertumbuhan	22
2. Produk Domestik Regional Bruto	26
E. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	29
1. Teori Ekonomi Klasik	29
2. Whilt Whitman Rostow	30
3. Friedrich List	30
4. Harrod-Domar	31
5. Thomas Robert Malthus	31

6. Teori Ekonomi Neo Klasik	31
7. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat	32
8. Teori Ekonomi Basis	32
F. <i>Location Quotient</i>	37
G. <i>Shift Share</i>	40
H. Strategi Pengembangan	41
I. Kerangka Konseptual	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Rancangan Penelitian	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
C. Objek Penelitian dan Informan	48
D. Jenis dan Sumber Data	48
1. Jenis Data	48
2. Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	56
1. Menganalisis Posisi Sektor Perikanan Di Kabupaten Mamuju	56
2. Menganalisis Strategi Peningkatan Kontribusi Perikanan	61
G. Definisi Operasional	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Keadaan Umum Kabupaten Mamuju	68
1. Letak Geografis	68
2. Luas Wilayah	68
3. Kependudukan	69
4. Pendidikan	70
5. Keadaan Tanah dan Iklim	71
6. Ketenagakerjaan	73
B. Keadaan Umum Perikanan Kabupaten Mamuju	75
1. Potensi Sumberdaya Perikanan	75

2. Pengolahan Hasil Perikanan	83
3. Pemasaran Hasil Perikanan	84
4. Tenaga Kerja Perikanan	85
5. Armada Penangkapan	86
6. Sarana dan Prasarana	86
7. Kelembagaan Perikanan	88
C. Kondisi Perekonomian Kabupaten Mamuju	90
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	90
2. Pertumbuhan Ekonomi	91
3. PDRB Perkapita	93
D. Posisi Sektor Perikanan di Kabupaten Mamuju Dilihat Dari PDRB Dan Tenaga Kerja	94
1. LQ Sektor Perikanan Berdasarkan Indikator Tenaga Kerja	95
2. LQ Sektor Perikanan Berdasarkan Indikator Pendapatan Wilayah	97
3. <i>Shift Share</i> Sektor Perikanan Berdasarkan Indikator Pendapatan Wilayah	100
E. Strategi Peningkatan Kontribusi Perikanan	104
1. Faktor Internal	104
2. Faktor Eksternal	112
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor		halaman
1	Matriks Hubungan Antara Tujuan, Data, Metode Dan Keluaran Pada Setiap Tahapan Penelitian	54
2	Matriks SWOT Untuk Menentukan Strategi Kebijakan	63
3	Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju Tahun 2011	70
4	Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Mamuju, Tahun 2011	71
5	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Mamuju Tahun 2011	74
6	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Mamuju Tahun 2011	75
7	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan Kabupaten Mamuju Tahun 2007 Sampai 2012	77
8	Jumlah Potensi, Existing Dan Produktif Tambak Menurut Kecamatan Kab. Mamuju Tahun 2012	78
9	Jumlah Produksi Tambak Menurut Kecamatan Di Kabupaten Mamuju, Tahun 2010-2012	79
10	Potensi Budidaya Air Tawar Kab. Mamuju Tahun 2012	80
11	Jumlah Produksi Budidaya Ikan Air Tawar Menurut Kecamatan Kabupaten Mamuju	81
12	Potensi Budidaya Rumput Laut Kab. Mamuju Tahun 2012	82

13	Jumlah Produksi Rumput Laut Menurut Kecamatan Di Kabupaten Mamuju, Tahun 2010-2012	83
14	Jumlah Dan Jenis Olahan Hasil Perikanan Kabupaten Mamuju 2012	84
15	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Perikanan Di Kabupaten Mamuju, Tahun 2007-2011	85
16	Armada Penangkapan Ikan Kabupaten Mamuju Tahun 2008-2012	86
17	Struktur Ekonomi Kabupaten Mamuju Tahun 2007 Sampai 2011 (Dalam Persen)	92
18	PDRB Perkapita Kabupaten Mamuju Dan Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2008 – 2011	94
19	LQ Sektor Perikanan Berdasarkan Indikator Tenaga Kerja, Terhadap Sektor Pertanian Tahun 2007-2011	95
20	LQ Sektor Perikanan Berdasarkan Indikator PDRB Harga Konstan Terhadap Sektor Pertanian, Tahun 2007-2011	98
21	Komponen Perubahan PDRB Sektor Pertanian Di Kabupaten Mamuju Sebagai Presentase PDRB Tahun Dasar 2007 Dan 2011	103
22	Matriks SWOT Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Dan Perikanan Kabupaten Mamuju	117
23	Penentuan Tingkat Kepentingan Unsur SWOT	118
24	Pemilihan Alternatif Strategi Yang Diprioritaskan	119

DAFTAR GAMBAR

Nomor		halaman
1	Kerangka Konseptual Strategi Peningkatan Kontribusi Perikanan Terhadap Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Mamuju	45
2	Peta Area Potensi Penangkapan Ikan	47
3	Bagan Alir Penelitian Strategi Peningkatan Kontribusi Perikanan Terhadap Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Mamuju	55
4	Komponen perubahan pertumbuhan proporsional (PP) dan pertumbuhan pangsa wilayah (PPW)	103

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		halaman
1	Pedoman Wawancara	130
2	Pedoman Observasi	135
3	Dokumentasi	137
4	Peta Area Potensi Penangkapan Ikan	141
5	Peta Sebaran Pusat Permukiman Nelayan	142
6	Peta Alur Pelayaran	143
7	Hasil Analisis <i>Shift Share</i> Sektor Pertanian Berdasarkan Indikator Pendapatan Wilayah	144
8	Data PDRB Kabupaten Mamuju Berdasarkan harga Berlaku Tahun 2007 – 2011	145
9	Data PDRB Kabupaten Mamuju Berdasarkan harga Konstan Tahun 2007 – 2011	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah memberikan peluang seluas-luasnya untuk memberdayakan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru dalam menggerakkan pembangunan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Hal tersebut merupakan suatu paradigma baru yang menuntut efisiensi efektivitas dan percepatan pembangunan di segala sektor termasuk sektor kelautan dan perikanan untuk berpacu mengikuti laju perkembangan pembangunan. Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah laut adalah 12 mil bagi provinsi dan 4 mil bagi daerah kabupaten ataupun kota yang di dalamnya terdapat sumberdaya ikan.

Potensi wilayah pesisir kelautan berkaitan dengan sumberdaya yang terkandung di dalamnya dapat mendorong pertumbuhan wilayah melalui kegiatan perikanan, industri pertambangan minyak dan gas bumi bawah laut, pariwisata, agrobisnis, agroindustri, transportasi, pelabuhan, permukiman serta kegiatan jasa ikutan lainnya. Menurut Parr (Dahuri,

2002), pembangunan dan pengembangan wilayah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pembangunan yang terpadu antar sektor dengan memperhatikan aspek keruangan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang mantap dan berkelanjutan diperlukan adanya ketersediaan dana pembiayaan yang besar. Untuk itu diperlukan berbagai upaya melalui peningkatan dana dari sumber pemerintahan yang berupa APBD maupun peningkatan dana masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi setiap sektor pembangunan dalam PDRB harus terus ditingkatkan, diantaranya melalui optimalisasi pengembangan sumberdaya alam yang dimiliki. Pengembangan potensi sumberdaya alam diprioritaskan pada sektor atau komoditas yang dianggap memiliki peluang bersaing dalam era pasar global. Salah satu sektor yang signifikan dengan pengembangan potensi sumberdaya adalah sektor perikanan dan kelautan.

Dengan karakteristik wilayah dan potensi daerah yang dimiliki serta strategi pengembangan yang mendukung, maka sektor perikanan dan kelautan seyogyanya menjadi primadona perekonomian dan berperan sebagai basis ekonomi untuk meningkatkan pendapatan wilayah.

Kabupaten Mamuju merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki luas lautan 1.635 km² dengan panjang pantai 254 km. Dengan proporsi luas lautan tersebut, maka potensi perikanan yang dimiliki juga potensial untuk dikembangkan. Salah satu diantaranya adalah

luas lahan yang dapat digunakan untuk usaha perikanan berupa budidaya tambak seluas 15.943,6 ha, kolam seluas 553,63 ha dan rumput laut 5.936,3 ha.

Kabupaten Mamuju memiliki 16 kecamatan dan 143 desa, 12 diantaranya adalah kecamatan pesisir. Dari 12 kecamatan tersebut 45 desa adalah desa yang berhubungan langsung dengan pesisir. Kontribusi sektor perikanan dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku sekitar 3,34% - 4,26% dan atas Dasar Harga Konstan sekitar 3,87% - 4,71% untuk tahun 2007-2011 (BPS Mamuju, 2012). Selain itu, dapat dilihat dari angka produksi perikanan pada tahun 2012, produksi perikanan mencapai 44.994,69 ton, terdiri atas perikanan tangkap sebesar 35.896,69 ton dan sisanya dihasilkan melalui kegiatan budidaya sebesar 9.098,20 ton (DKP Mamuju, 2012).

Sektor perikanan diharapkan akan terus berkembang menjadi sektor yang strategis dalam pembangunan wilayah Kabupaten Mamuju pada masa mendatang. Sektor perikanan dalam perekonomian Kabupaten Mamuju, meskipun kontribusinya masih kecil dibandingkan sektor yang lain tetapi kontribusinya terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu strategi untuk meningkatkan kontribusi yang lebih besar dalam perekonomian wilayah. Dalam konteks inilah maka penelitian ini perlu dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana posisi sektor perikanan di Kabupaten Mamuju dilihat dari PDRB dan Tenaga Kerja?
2. Bagaimana strategi pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Mamuju ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis posisi sektor perikanan di Kabupaten Mamuju dilihat dari PDRB dan Tenaga Kerja.
2. Merumuskan strategi pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Mamuju

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Dapat memberikan informasi mengenai posisi sektor perikanan di Kabupaten Mamuju dilihat dari PDRB dan Tenaga Kerja;
2. Sebagai bahan informasi dan dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya;

3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan pengembangan subsektor perikanan di Kabupaten Mamuju.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yakni :

1. penelitian ini yaitu memfokuskan penelitian pada strategi peningkatan kontribusi perikanan terhadap pertumbuhan wilayah yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju.
2. Indikator yang akan digunakan adalah pendapatan wilayah (PDRB) dan tenaga kerja. Penentuan indikator tersebut berdasarkan pada pentingnya peranan masing-masing indikator terhadap pembangunan wilayah di Kabupaten Mamuju.
3. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2007 sampai dengan 2011, data penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dalam subsektor perikanan.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah meliputi :

1. Bab I, Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan itu sendiri.

2. Bab II, Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang relevan dalam penulisan ini seperti aspek perikanan, pembangunan sektor perikanan, kondisi perikanan Kabupaten Mamuju, pengembangan wilayah, teori ekonomi basis dan kerangka konseptual.

3. Bab III, Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan definisi operasional.

4. Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya.

5. Bab V, Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Aspek Perikanan

Perikanan berdasarkan UU No.31 Tahun 2004 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sementara berdasarkan BPS dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2009, yang termasuk dalam sektor perikanan adalah kegiatan usaha yang mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting), moluska, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar.

Sumberdaya perikanan termasuk kepada kelompok sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resource*). Meskipun demikian dalam pemanfaatan sumberdaya ini harus rasional sebagai usaha untuk menjaga keseimbangan produksi dan kelestarian sumberdaya. Hal ini perlu adanya penegasan karena sumberdaya perikanan merupakan sumberdaya milik bersama (*common property resources*) dalam artian hak properti atas sumberdaya tersebut dipegang secara bersama-sama sehingga tidak ada larangan bagi siapapun untuk memanfaatkannya. Secara garis besar, sumberdaya perikanan dapat dimanfaatkan melalui penangkapan ikan (perikanan tangkap) dan budidaya ikan, sehingga

usaha perikanan merupakan semua kegiatan yang dilakukan secara perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil dan mendapatkan laba dari kegiatan yang dilakukan (Monintja, 2001).

Berdasarkan Undang-undang 45 Tahun 2009, penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun. Sementara pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

Perikanan tangkap adalah kegiatan ekonomi yang mencakup penangkapan atau pengumpulan hewan dan tanaman air yang hidup di air laut atau perairan umum secara bebas. Perikanan tangkap merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa elemen yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya, yang disebut dengan agribisnis perikanan (Larasati, 2007).

Perikanan budidaya merupakan usaha pemeliharaan dan pengembangbiakkan ikan atau organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau akuakultur mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja, tetapi juga organisme air lain seperti kerang, udang maupun tumbuhan air.

Merupakan suatu proses pembiakkan organisme perairan dari mulai proses produksi, penanganan hasil sampai pemasaran (Wheaton, 1977).

Akuakultur merupakan upaya produksi biota atau organisme perairan melalui penerapan teknik domestikasi (membuat kondisi lingkungan yang mirip dengan habitat asli organisme yang dibudidayakan), penumbuhan hingga pengelolaan usaha yang berorientasi ekonomi (Bardach dkk, 1972).

Menurut Ningsih (2005) sumberdaya perikanan laut dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar yaitu: (1) sumberdaya ikan demersal, yaitu jenis ikan yang hidup di atau dekat dasar perairan; (2) sumberdaya ikan pelagis, yaitu jenis sumberdaya ikan yang hidup di sekitar permukaan perairan; (3) sumberdaya ikan pelagis besar, yaitu jenis ikan *oceanik* seperti tuna, cakalang, tenggiri dan lain-lain; (4) sumberdaya udang dan biota laut non ikan lainnya seperti kuda laut, sedangkan potensi pengembangan pada perikanan budidaya dapat dilakukan pada (1) budidaya laut terdiri dari budidaya ikan, moluska dan rumput laut; (2) budidaya air payau; (3) air tawar yang terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai dan rawa), kolam air tawar dan mina padi sawah (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010).

B. Pembangunan Sektor Perikanan

Sebagai negara kepulauan dengan potensi perikanan yang besar, seharusnya sektor perikanan menjadi andalan dalam pembangunan Indonesia. Selain itu, sektor perikanan juga berpotensi untuk dijadikan penggerak utama (*prime mover*) ekonomi Indonesia. Namun secara empiris pembangunan sektor perikanan selama ini kurang mendapatkan perhatian, sehingga kontribusi dan pemanfaatannya dalam perekonomian Indonesia masih kecil.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai *prime mover* pembangunan ekonomi nasional, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan politik dan ekonomi serta iklim sosial yang kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta *stakeholders* lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010).

Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, merupakan suatu langkah untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan revitalisasi diharapkan sektor perikanan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan (petani ikan), menyumbang terhadap ekspor nonmigas, mengurangi kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja nasional, sehingga lebih dapat meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian Indonesia.

Menurut Kurniawan (2010) pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, tidak boleh dipandang hanya sebagai cara untuk menghilangkan kemiskinan dan pengangguran. Namun, lebih dari itu, karena sektor kelautan dan perikanan merupakan basis perekonomian nasional, maka sudah sewajarnya jika sektor perikanan dan kelautan ini dikembangkan menjadi sektor unggulan dalam kancah perdagangan internasional. Dengan demikian, dukungan sektor industri terhadap pembangunan di sektor perikanan dan kelautan menjadi suatu hal yang bersifat keharusan. Karena itu, pembangunan perikanan dan kelautan dan industri bukanlah alternatif yang dipilih, namun adalah komplementer dan saling mendukung baik bagi input maupun output.

Secara teoretis pengembangan perikanan memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Keterkaitan umum antara sumberdaya perikanan, produksi, usaha penangkapan, kebijakan pemerintah, dan pasar akan berpengaruh kepada GDP yang selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional (Soemokaryo, 2001).

Pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan perlu dijadikan arus utama (*mainstream*) pembangunan nasional baik secara ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu: (1) melimpahnya sumberdaya kelautan dan perikanan yang kita miliki, dengan sejumlah keunggulan komparatif sekaligus kompetitif yang sangat tinggi; (2) keterkaitan yang kuat (*backward dan forward linkages*) antara industri berbasis kelautan dan perikanan dengan industri

dan aktivitas ekonomi lainnya; (3) merupakan sumberdaya yang senantiasa dapat diperbaharui sehingga keunggulan komparatif dan kompetitif ini dapat bertahan lama asal diikuti dengan pengelolaan yang arif; (4) dari aspek politik, stabilitas politik dalam dan luar negeri dapat dicapai jika kita memiliki jaminan keamanan dan pertahanan dalam menjaga kedaulatan perairan; dan (5) dari sisi sosial dan budaya, merupakan penemuan kembali (*reinventing*) aspek kehidupan yang pernah dominan dalam budaya dan tradisi kita sebagai bangsa maritim (Dahuri, 2002).

Pembangunan perikanan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan (petani ikan) dengan jalan meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan usaha (Reksohadiprodjo dan Pradono, 1988). Namun mengingat kegiatan perikanan yang dapat dikatakan sebagai usaha yang sangat tergantung pada alam dan ketersediaan sumberdaya di suatu perairan menyebabkan adanya fluktuasi kegiatan usaha perikanan yang sangat jelas. Pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi aktivitas nelayan (petani ikan) dalam berusaha. Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, strategi pembangunan dengan basis sumberdaya alam dapat pulih (seperti sektor perikanan) merupakan suatu hal yang tepat. Hal ini dikarenakan: (1) potensi sumberdaya Indonesia yang sangat besar; (2) keterkaitan industri hulu (*backward-linkages industri*) dan keterkaitan industri hilir (*foward-linkages industries*) yang kuat dan

diharapkan dapat menciptakan efek ganda (*multiplier effects*) yang besar; (3) penyerapan tenaga kerja yang besar; (4) dapat mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dikarenakan kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya alam yang dapat pulih bisa dan biasanya berlangsung di daerah pedesaan; (5) karena bersifat dapat pulih, maka bisa mewujudkan pola pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Dahuri, 2001).

Menurut Kusumastanto (2000), salah satu persoalan yang mendasar dalam perencanaan pengembangan sektor perikanan adalah lemahnya akurasi data statistik perikanan. Hal ini menyebabkan kendala dalam penerapan kebijakan pengembangan sektor perikanan. Selain itu, untuk menjadikan sektor perikanan sebagai motor penggerak sektor riil, dalam pengembangannya harus memperhatikan kaidah ekonomi dengan memperhatikan keterkaitan dengan berbagai sektor ekonomi.

Menurut Fauzie (2009), perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan didasarkan pada konsepsi pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan industri berbasis sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam mencapai daya saing yang tinggi. Tiga hal pokok yang akan dilakukan terkait arah pembangunan sektor perikanan ke depan, yaitu: (1) membangun sektor perikanan yang berkeunggulan kompetitif (*competitive advantage*) berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*); (2) menggambarkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan; (3)

mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah. Dalam konteks pola pembangunan tersebut, ada tiga fase yang harus dilalui dalam mentransformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan dalam hal daya saing, yaitu: (a) fase pembangunan yang digerakkan oleh kelimpahan sumberdaya alam (*resources driven*); (b) fase kedua adalah pembangunan yang digerakkan oleh investasi (*investment driven*) dan; (c) fase ketiga pembangunan yang digerakkan oleh inovasi (*inovation driven*).

Menurut Dahuri (2001), proses pemanfaatan sumberdaya perikanan ke depan harus ada kesamaan visi pembangunan perikanan yaitu suatu pembangunan perikanan yang dapat memanfaatkan sumberdaya ikan beserta ekosistemnya secara optimal bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia, terutama petani ikan dan nelayan secara berkelanjutan. Untuk dapat mewujudkan visi pembangunan perikanan tersebut, ada tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pertama, sektor perikanan harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi secara nasional melalui peningkatan devisa, peningkatan pendapatan rata-rata para pelakunya serta mampu meningkatkan sumbangan terhadap PDB. Kedua, sektor perikanan harus mampu memberikan keuntungan secara signifikan kepada pelakunya dengan cara mengangkat tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan. Ketiga, pembangunan perikanan yang akan dilaksanakan selain dapat menguntungkan secara ekonomi, juga ramah secara ekologis yang artinya

pembangunan harus memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan dengan baik.

Dalam pengembangan sektor perikanan tidak hanya terkait dalam usaha perikanan tangkap maupun budidaya saja. Menurut Erwadi dan Syafri (Hendri, 2010) peluang bisnis kelautan dan perikanan setidaknya dapat dilihat dari dua faktor, yaitu: (1) faktor internal berupa potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, potensi sumberdaya manusia, teknologi, sarana dan prasarana serta pemasaran, dan (2) faktor eksternal yang berkaitan dengan aspek permintaan produk perikanan dan syarat-syarat yang menyertai permintaan tersebut dalam rangka persaingan.

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), dan *pro-growth* (pertumbuhan). Dengan melihat potensi yang ada, pembangunan kelautan dan perikanan harusnya dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dari pada keadaan sekarang. Adanya kesalahan orientasi pembangunan dan pengelolaan sumberdaya menyebabkan Indonesia belum dapat mengoptimalkan manfaat dari potensi sumberdaya yang ada (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010).

Menurut Rustiadi *et al.* (2009), sektor strategis adalah sektor yang memberikan sumbangan besar dalam perekonomian wilayah dan memiliki keterkaitan kuat secara sektoral maupun spasial. Ditambahkan pula

bahwa pembangunan yang dilakukan secara terpadu dan lintas sektoral, akan berlangsung secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mengurangi terjadinya kebocoran wilayah (*regional leakages*). Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi mutlak dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berimbang antara *growth*, *equity* dan *sustainability* (Rustiadi *et al*, 2009).

Mengingat besarnya potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Mamuju, dapat diharapkan peranan sektor perikanan akan makin penting di masa yang akan datang. Kebijakan pengembangan sektor perikanan juga harus diletakkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (*sustainability*), selain indikator *growth* (produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan) dan *equity* (pemerataan, keadilan, dan keberimbangan). Pembangunan perikanan yang berimbang antara *growth*, *equity*, dan *sustainability* seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dengan sendirinya menurunkan tingkat kemiskinan.

C. Pengembangan Wilayah

Wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografi yang membutuhkan organisasi dan penataan ruang dan waktu dalam pemanfaatan segala kekayaannya, selain dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal (Budiharsono, 2001).

Pengembangan wilayah memandang pentingnya keterpaduan sektoral, spasial serta keterpaduan antar pelaku pembangunan di dalam dan antar wilayah. Keterpaduan sektoral menuntut adanya keterkaitan fungsional yang sinergis antar sektor pembangunan, sehingga setiap kegiatan pembangunan dalam kelembagaan sektoral dilaksanakan dalam kerangka pembangunan wilayah. Dalam pandangan sistem industri, keterpaduan sektoral berarti keterpaduan sistem input dan output industri yang efisien dan sinergis. Oleh karena itu, wilayah yang berkembang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan antar sektor ekonomi wilayah, dalam arti terjadi transfer input dan output barang dan jasa antar sektor yang sangat dinamis (Rustiadi *et al*, 2009).

Menurut Rustiadi *et al*. (2009), skala prioritas diperlukan dalam suatu perencanaan pembangunan karena keterbatasan sumberdaya yang tersedia. Dari dimensi pembangunan, suatu skala prioritas didasarkan atas pemahaman bahwa: (1) setiap sektor memiliki sumbangan langsung dan tidak langsung yang berbeda terhadap pencapaian sasaran pembangunan (penyerapan tenaga kerja, pendapatan wilayah, dan lain-lain); (2) setiap sektor memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya dengan karakteristik yang berbeda-beda; dan (3) aktivitas sektoral tersebar secara tidak merata dan spesifik, beberapa sektor cenderung memiliki aktivitas yang terpusat dan terkait dengan sebaran sumberdaya.

Pembangunan adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Sebagai

proses yang bersifat terpadu, pembangunan dilaksanakan berdasarkan potensi lokal yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam, manusia, buatan, maupun sumberdaya sosial. Pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Tujuan akhir pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat (Rustiadi *et al*, 2009). Untuk menilai pembangunan dapat digunakan beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Indikator berbasis tujuan pembangunan: (1) produktivitas, efisiensi dan pertumbuhan (*growth*); (2) pemerataan, keadilan dan keberimbangan (*equity*); dan (3) keberlanjutan (*sustainability*).
- b. Indikator pembangunan berbasis sumberdaya, yaitu cara mengukur tingkat kinerja pembangunan dengan mengembangkan berbagai ukuran operasional berdasarkan pemanfaatan dan kondisi sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, alam, buatan, dan sumberdaya sosial.
- c. Indikator pembangunan berbasis proses; merupakan suatu cara mengukur kinerja pembangunan dengan mengedepankan proses pembangunan itu sendiri dengan melihat *input*, proses atau implementasi, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*.

Menurut Rustiadi *et al*. (2009), pembangunan regional yang berimbang merupakan pembangunan yang merata dari wilayah yang

berbeda untuk meningkatkan pengembangan kapabilitas dan kebutuhan mereka, yaitu adanya pertumbuhan yang seoptimal mungkin dari potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah sesuai dengan kapasitasnya. Dengan demikian, diharapkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan merupakan hasil interaksi yang saling memperkuat di antara sesama wilayah yang terlibat, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah (disparitas pembangunan regional).

Disparitas pembangunan regional didefinisikan sebagai kesenjangan pembangunan antar wilayah sebagai akibat investasi dan sumber daya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah-wilayah *hinterland* mengalami pengurasan sumber daya secara berlebihan (Rustiadi *et al*, 2009). Fungsi utama dari aktivitas pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Saefulhakim *dalam* Suryawardana (2006), untuk mencapai fungsi tersebut maka aktivitas-aktivitas dapat dilakukan pemerintah melalui: (1) regulasi, tata aturan, penegakan norma, dan pengawasan; (2) *public facility provision*, penyediaan fasilitas umum, artinya pemerintah sebagai koordinator pengadaan; dan (3) penentuan lokasi fasilitas umum yang tepat. Namun dalam terbatasnya anggaran pemerintah dan arah dari alokasi pengeluaran pemerintah itu sendiri.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, maka pemerintah seharusnya mengarahkan pengeluarannya kepada sektor-sektor unggulan karena mempunyai nilai keterkaitan dan *multiplier* yang besar. Selain

pemerintah, peran yang sangat diharapkan adalah dari investasi. Investasi yang mengarah kepada sektor unggulan juga akan meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian daerah. Kinerja pembangunan daerah dapat tercapai apabila penganggaran telah sesuai dengan tujuan daerah itu sendiri, antara lain kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan wilayah, dan meningkatkan daya beli masyarakat (Suryawardana, 2006).

Kebijaksanaan ekonomi regional ialah penggunaan secara sadar berbagai macam peralatan (instrumen) untuk merealisasikan tujuan-tujuan regional, dan tanpa adanya usaha yang disengaja tersebut tidak akan tercapai. Kebijakan pembangunan regional harus disesuaikan dengan struktur dasar masing-masing daerah. Salah satu tujuan dari kebijakan pembangunan adalah mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan atau pembangunan dan kemakmuran antar daerah yang satu dengan daerah yang lain (Kadariah, 1985).

Perencanaan regional dimaksudkan agar semua daerah dapat melaksanakan pembangunan secara proporsional dan merata sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Manfaat perencanaan regional adalah untuk pemerataan pembangunan. Apabila perencanaan regional dan pembangunan regional berkembang dengan baik, maka diharapkan daerah dapat tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri (Soekartawi, 1990).

Dalam perencanaan pembangunan regional terdapat beberapa teknik analisis regional yang dapat dipergunakan untuk menentukan atau

memilih aktivitas ekonomi yang dikembangkan dalam suatu daerah atau menentukan lokasi yang sesuai dengan aktivitas ekonomi. Teknik-teknik tersebut antara lain Basis Ekonomi, *Multiplier Effect*, Model Gravitasi, analisis Titik Pertumbuhan dan analisis *Input-Output* (Richardson, 1991).

Perencanaan pembangunan wilayah dari aspek ekonomi menurut Rustiadi *et al*, (2009) adalah penentuan peran sektor-sektor pembangunan dalam mencapai target pembangunan yaitu pertumbuhan, yang diikuti dengan kegiatan investasi pembangunan baik itu investasi pemerintah maupun investasi swasta. Masalah kebijakan sangat penting untuk dipahami dengan menggunakan metode-metode analisis bersifat deskriptif dan informasi yang nyata mengenai masalah sebab akibat kebijakan. Analisis kebijakan adalah setiap jenis analisis yang dapat menghasilkan dan menyajikan informasi. Analisis tersebut dapat menjadi dasar bagi pengambil keputusan dalam menguji setiap pendapat yang dikemukakan. Kebijakan pembangunan yang direncanakan secara jelas dan terperinci dengan dasar peran aktif masyarakat serta dukungan dari pihak aparat pelaksana yang baik merupakan suatu awal dari keberhasilan perencanaan pembangunan yang akan dicapai.

Kebijakan dan strategi yang diterapkan haruslah bersifat menyeluruh dan terpadu antara sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan perairan. Selain itu, pemanfaatan perairan adalah sebagai sarana dan media peragangan antar wilayah maupun antar negara bagi

kepentingan bangsa dan negara serta mewujudkan pertahanan dan keamanan di wilayah perairan di Indonesia (Rustiadi *et al*, 2009).

Analisis dapat dilakukan secara objektif dengan menentukan kriteria dan indikator kinerja sebagai dasar evaluasi. Kriteria dan indikator keberhasilan pembangunan perikanan merupakan jembatan yang menghubungkan antara tujuan dan aksi yang dilakukan. Semua hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, transparansi, keefektivan serta akuntabilitas pengelolaan sumberdaya perikanan.

D. Pertumbuhan Wilayah

1. Definisi Pertumbuhan

Istilah pertumbuhan dan perkembangan sesungguhnya tidak bermakna sama. Menurut Parr (Dahuri, 2002) perkembangan senantiasa disertai dengan perubahan struktural. Pertumbuhan merupakan suatu proses kontinyu sebagai hasil dari berbagai pengembangan keputusan di dalam ataupun yang mempengaruhi suatu wilayah.

Parr (Dahuri, 2002), mengemukakan bahwa suatu wilayah tumbuh dan berkembang dapat didekati melalui teori sektor dan teori tahapan perkembangan. Teori sektor diadopsi dari Fisher dan Clark yang mengemukakan bahwa berkembangnya wilayah atau perekonomian nasional dihubungkan dengan transformasi struktur ekonomi dalam tiga sektor utama, yakni primer (pertanian, kehutanan, perikanan), sekunder

(pertambangan, manufaktur, konstruksi, utilitas publik) dan tersier (perdagangan, transportasi, keuangan, utilitas, publik).

Menurut Djojohadikusumo (1994), ciri pokok dalam proses pertumbuhan yang menyangkut peningkatan produksi dan pendapatan terdapat dinamika yang menyebabkan faktor perubahan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses merupakan peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam pertumbuhan ekonomi, proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sejumlah sarana produksi tertentu. Hubungannya ditunjukkan dengan perimbangan kuantitatif antara sejumlah sarana produksi di satu pihak dengan hasil seluruh produksi di pihak lain.

Pertumbuhan ekonomi dalam arti terbatas yaitu peningkatan produksi dan pendapatan yang dapat berlangsung tanpa terwujudnya pembangunan. Pembangunan merupakan suatu transformasi dalam arti perubahan struktural, yaitu perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang meliputi perubahan pada perimbangan-perimbangan keadaan yang melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan bentuk susunan ekonomi (Djojohadikusumo, 1994).

Pertumbuhan dalam pendekatan permintaan terjadi sebagai akibat adanya permintaan barang dan jasa tertentu terhadap suatu wilayah oleh

wilayah lainnya. Upaya memenuhi permintaan ekspor tersebut dengan menggerakkan potensi dan sistem produksi lokal akan memberikan pertumbuhan ekonomi bagi daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi permintaan luar wilayah dapat dipenuhi berarti semakin tinggi pula aktivitas ekonomi lokal dan pertumbuhannya. Pertumbuhan wilayah berdasarkan pendekatan wilayah yang sangat umum dikenal adalah teori pertumbuhan berbasis ekspor (Dahuri, 2002).

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya diukur dalam harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer payment* yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah (Richardson, 1991).

Ada dua cara pendekatan yang dapat digunakan (Richardson, 1991). Pertama, mengadaptasi model-model ekonomi makro yang digunakan dalam teori pertumbuhan agregatif dan yang kedua menafsirkan pertumbuhan suatu daerah menurut struktur dinamika industrinya. Untuk pendekatan yang pertama terdapat tiga model umum yang digunakan yaitu model Neo-klasik, Basis Ekspor, dan Harrod-Domar.

Dalam model Neo-klasik tingkat pertumbuhan terdiri dari tiga sumber yaitu akumulasi modal, tenaga kerja, dan residu yang dapat dinamakan sebagai kemajuan teknik (Richardson, 1991). Sementara menurut model Basis Ekspor, pertumbuhan suatu daerah tergantung pada pertumbuhan industri-industri ekspornya dan kenaikan permintaan yang bersifat ekstrim bagi daerah yang bersangkutan adalah penentu pokok dari pertumbuhan regional. Sektor-sektor perekonomian suatu daerah dikelompokkan menjadi sektor basis dan non basis. Sektor basis merupakan sektor yang memiliki keunggulan komparatif (dibanding dengan daerah lain dalam lingkup wilayah yang lebih luas) dengan sasaran utama untuk diekspor ke daerah lain.

Pada model Harrod-Domar, memfokuskan peranan kunci kepada investasi dalam proses pertumbuhan ekonomi, lebih diutamakan tentang watak ganda yang dimiliki investasi. Dia menciptakan pendapatan (dampak permintaan) dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (dampak penawaran). Selama investasi netto tetap berlangsung, pendapatan nyata dan output akan semakin membesar. Model ini juga dapat digunakan untuk menganalisa pertumbuhan regional dengan cara memperhitungkan perpindahan modal dan tenaga kerja *interregional* (Richardson, 1991). Semakin tinggi hasrat masyarakat di suatu daerah untuk menabung dan apabila rasio modal-output mereka semakin rendah, dengan demikian daerah tersebut akan bertumbuh semakin cepat. Impor netto adalah

tambahan kepada tabungan total suatu daerah, maka daerah-daerah yang memiliki surplus impor dapat tumbuh lebih cepat dari daerah-daerah lainnya.

2. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator ekonomi makro yang berperan dalam membuat perencanaan kebijaksanaan dalam pembangunan, menentukan arah pembangunan serta mengevaluasi hasil pembangunan suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto. PDRB dapat dijadikan sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi sektoral agar dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang menyebabkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi. Besar kecilnya PDRB yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah tergantung oleh besarnya sumberdaya alam yang telah dimanfaatkan, jumlah dan mutu sumberdaya manusia, kebijaksanaan pemerintah, letak geografis serta tersedianya sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Terdapat beberapa ukuran pendapatan nasional, di antaranya: *Gross National Product (GNP)* atau Produk Nasional Bruto (PNB), *Gross Domestic Product (GDP)* atau Produk Domestik Bruto (PDB), *Net National Product (NNP)* atau Produk Nasional Neto (PNN), dan *National Income (NI)* atau Pendapatan Nasional (PN) (Dumairy, 1996).

Menurut Gillis *et al* (1992), Produk Nasional Bruto (PNB) adalah penjumlahan nilai produk akhir barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) tanpa menghitung nilai produk antara. Produk Domestik bruto (PDB) sama

dengan PNB, yang perhitungannya mengeluarkan pendapatan warga negara yang berada di luar negeri, tetapi memasukkan seluruh produksi dalam negeri termasuk pendapatan yang diterima warga negara asing. Sementara PDB untuk tingkat wilayah regional pada sebuah Negara dikenal dengan sebutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan dua metode antara lain (Dumairy, 1996):

a. Metode Langsung

Dalam menghitung PDRB dengan metode langsung, perhitungan diserahkan sepenuhnya pada kepada data daerah yang terpisah dari data nasional, sehingga hasil perhitungannya mencakup seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Dalam metode ini PDRB dapat diukur dengan tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Produksi

PDRB merupakan jumlah barang dan jasa terakhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi dimaksud secara garis besar dipilah-pilah menjadi 11 sektor (dapat juga dibagi menjadi 9 sektor) yaitu: (1) pertanian; (2) pertambangan dan penggalan; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air minum; (5) bangunan; (6) perdagangan; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) bank dan lembaga keuangan lainnya; (9) sewa rumah; (10) pemerintahan; dan (11) jasa-jasa.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu setahun. Balas jasa produksi yang dimaksud meliputi upah dan gaji, sewa tanah, modal, dan keuntungan. Semuanya dihitung sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam hal ini mencakup juga penyusutan dan pajak-pajak tak langsung netto. Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut *nilai tambah bruto sektoral*. Oleh sebab itu PDRB menurut pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan dari nilai tambah bruto seluruh sektor atau lapangan usaha.

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir, meliputi (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan; (2) pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok; (3) pengeluaran konsumsi pemerintah; serta (4) ekspor netto (yaitu ekspor dikurang impor) dalam jangka waktu setahun.

b. Metode Tidak Langsung / Alokasi

Menghitung nilai tambah suatu kelompok kegiatan ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah nasional kedalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional. Sebagai alokator digunakan indikator yang paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut. Pemakaian masing-masing metode pendekatan sangat tergantung pada data yang tersedia.

Pada kenyataannya, pemakaian kedua metode tersebut akan saling mendukung satu sama lain, karena metode langsung akan mendorong peningkatan mutu atau kualitas data daerah. Dilihat dari penjelasan di atas PDRB dari suatu daerah/wilayah lebih menunjukkan pada besaran produksi suatu daerah bukan pendapatan yang sebenarnya diterima oleh penduduk sekitar yang bersangkutan. Walaupun demikian, PDRB merupakan data yang paling representatif dalam menunjukkan pendapatan dibandingkan dengan data-data yang lainnya.

E. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

1. Teori Ekonomi Klasik

Orang pertama yang membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis, sehingga dijuluki sebagai nabi ekonomi adalah *Adam Smith* (1723-1790). Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi tahap yang berurutan yang dimulai dari masa berburu, masa beternak, masa bercocok taman, masa berdagangan, dan tahap masa industri. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi, pembagian tenaga kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori ini, dalam upaya

peningkatan produktivitas kerja. Dalam pembangunan ekonomi modal memegang peranan penting.

Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu sama lainnya. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus tunduk pada pada fungsi kendala yaitu keterbatasan sumberdaya ekonomi (Kuncoro, 1997).

2. Whilt Whitman Rostow

Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap yaitu: masyarakat tradisional (*the traditional society*) prasyarat untuk tinggal landas (*the preconditions for take off*), tinggal landas (*take off*), menuju kedewasaan (*the drive maturity*) dan masa konsumsi tinggi (*the age of high mass consumption*) (Hasani, 2010).

3. Friedrich List

Menurut List, dalam bukunya yang berjudul *Das Nationale der Politisvphen Oekonomie* (1840), sistem liberal yang *laizes-faire* dapat menjamin alokasi sumberdaya secara optimal. Perkembangan ekonomi menurut List melalui 5 tahap yaitu: tahap primitif, beternak, pertanian dan

industri pengolahan (*manufacturing*), dan akhirnya pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan (Hasani, 2010).

4. Harrod-Domar

Teori ini menganggap setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Rasio modal output (*COR*) sebagai suatu hubungan antara investasi yang ditanamkan dengan pendapatan tahunan yang dihasilkan dari investasi tersebut (Tarigan, 2004).

5. Thomas Robert Malthus

Malthus menitikberatkan perhatian pada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian tergantung pada jumlah output yang dihasilkan oleh tenaga kerja, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut (Hasani, 2010).

6. Teori Ekonomi Neo Klasik

Menurut teori ini ada 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi daerah. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bias mengalir tanpa retriksi

(pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju daerah yang berupah rendah (Hasani, 2010).

7. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat

Teori pertumbuhan jalur cepat (turnpike) diperkenalkan oleh Samuelson (1955). Setiap negara perlu melihat sektor/komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan. Artinya dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat memproduksi dalam waktu yang relatif singkat dan volume sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus dapat menembus dan mampu bersaing pada pasar luar negeri. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang, sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh (Tarigan, 2004).

8. Teori Ekonomi Basis

Dalam konteks Ilmu Ekonomi Regional, terdapat berbagai model yang bermanfaat untuk menjelaskan perubahan regional dan untuk memprediksikan implikasi-implikasi yang nantinya akan terjadi serta bermanfaat bagi perencanaan di waktu yang akan datang. Salah satu teori yang paling sederhana dan barangkali paling terkenal adalah teori basis ekonomi (*Economic Based Theory*) (Glasson, 1977).

Inti dari model ekonomi basis adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Ekspor tersebut berupa barang-barang dan jasa, termasuk tenaga kerja (Budiharsono, 2001). Menurut Tarigan (2004), kegiatan ekspor adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah karena kegiatan basis. Tenaga kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi dari permintaan yang bersifat *exogenous* (tidak tergantung pada kekuatan intern atau permintaan lokal). Semua kegiatan lain yang bukan kegiatan basis termasuk ke dalam kegiatan atau sektor *service* atau pelayanan. Sektor non basis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, sehingga pendapatan masyarakat setempat sangat berpengaruh. Sektor ini tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah adalah sektor basis. Tenaga kerja dan pendapatan pada sektor basis adalah fungsi permintaan dari luar (*exogeneous*), yaitu permintaan dari luar yang mengakibatkan terjadinya ekspor dari wilayah tersebut (Budiharsono, 2001).

Menurut Glasson (1977), secara implisit di dalam pembagian kegiatan-kegiatan ini terdapat hubungan sebab akibat yang membentuk teori basis ekonomi. Bertambah banyaknya kegiatan basis di suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan terhadap barang dan jasa didalamnya dan

menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya, berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan, dan turunnya permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis. Dengan demikian, sesuai dengan namanya, kegiatan basis mempunyai peranan penggerak pertama (*prime mover role*) dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional.

Arus pendapatan yang masuk ke dalam suatu wilayah akan menyebabkan kenaikan konsumsi maupun kenaikan investasi dalam wilayah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja. Kesempatan kerja yang baru akan menampung pengangguran yang terdapat di daerah tersebut atau dapat menjadi daya tarik bagi orang-orang dari luar wilayah yang mencari pekerjaan (Kadariah, 1985).

Penggunaan Teori Basis Ekonomi menurut Glasson (1977), terdapat sejumlah kekurangan antara lain kekurangan yang bersifat teknis seperti unit pengukuran, metode identifikasi dan pemilihan unit wilayah serta diabaikannya peranan impor. Kelemahan dari segi unit pengukuran adalah penggunaan kesempatan kerja (*employment*) sebagai indikator. Hal ini dikemukakan oleh Richardson (1991) yang menyatakan bahwa *employment* bersifat diskontinyu, sehingga kurang peka sebagai indikator perubahan-perubahan kegiatan basis. Pendapatan regional akan langsung mengalami kenaikan nilai apabila terjadi perluasan kegiatan

basis, sedangkan kenaikan jumlah tenaga kerja baru terasa dalam jangka panjang. Masalah lainnya adalah adanya *time lag* antara respon dari sektor basis terhadap permintaan luar wilayah dan respon dari sektor non basis terhadap perubahan sektor basis. Masalah ini dapat diatasi dengan penggunaan data *time series* selama tiga sampai lima tahun. Dari segi metode identifikasi, masalah yang sering ditemui adalah perbedaan hasil identifikasi, jika metode yang digunakan berbeda. Kesulitan dalam pemilihan unit wilayah atau lokasi karena perlu diperhatikannya berbagai faktor yang mempengaruhi seperti tujuan analisis, faktor-faktor administratif dan regional serta ketersediaan data. Kekurangan teori ini sebagai akibat mengabaikan peran impor, disebabkan karena peningkatan pada kegiatan basis hanya akan menghasilkan *multiplier effect* yang sangat kecil pada kegiatan non basis jika sebagian besar pendapatan yang diperoleh dibelanjakan ke luar daerah dalam bentuk impor. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dicapai melalui peningkatan ekspor dari industri-industri basis, tetapi juga dengan melakukan usaha substitusi impor.

Teori Basis Ekonomi tetap relevan digunakan dalam analisis dan perencanaan regional, meskipun terdapat beberapa kekurangan (Glasson, 1977). Teori ini memiliki keunggulan karena sangat sederhana dan mudah diterapkan serta bermanfaat dalam usaha memahami struktur ekonomi suatu wilayah dan dampak yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam jangka pendek. Pada kondisi tertentu, misalnya dalam mempelajari

wilayah yang kecil dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada kegiatan ekspor, kekurangan yang ada dapat diminimumkan dan teori ini sangat bermanfaat untuk membuat peramalan jangka pendek (*short-run forecasting*).

Menurut Tarigan (2004) untuk mendorong pertumbuhan suatu wilayah, perlu didorong pertumbuhan sektor basis karena mendorong pertumbuhan sektor lainnya, yaitu sektor non basis. Dalam suatu wilayah, sektor basis adalah sektor yang menjual produknya ke luar wilayah atau ada kegiatan yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Namun demikian, apabila suatu kegiatan basis ingin dikembangkan secara besar-besaran, perlu dilihat apakah pasar di luar wilayah (luar negeri) masih mampu menampung perluasan dari produk basis tersebut.

Untuk melihat apakah pasar produk yang dihasilkan tidak cepat jenuh, perlu dilihat tingkat kebasisan suatu produk, yang pada dasarnya melihat berapa luas pasar yang dijangkau oleh produk tersebut. Tingkat kebasisan suatu produk, misalnya dijenjangkan sebagai berikut: (1) jangkauan pemasarannya hanya pada beberapa desa tetangga; (2) jangkauan pemasarannya hanya pada beberapa wilayah kecamatan; (3) jangkauan pemasarannya hanya pada wilayah satu provinsi; (4) jangkauan pemasarannya mencakup beberapa wilayah provinsi; (5) jangkauan pemasarannya mencakup sebagian besar wilayah ekonomi dan ekspor; (6) jangkauan pemasarannya pada hampir seluruh wilayah ekonomi nasional dan merupakan ekspor tradisional.

F. *Location Quotient* (LQ)

Untuk mengetahui suatu sektor merupakan sektor basis atau non basis dapat digunakan beberapa metode, yaitu: (1) metode pengukuran langsung dan (2) metode pengukuran tidak langsung. Metode pengukuran langsung dapat dilakukan dengan survei langsung untuk mengidentifikasi sektor mana yang merupakan sektor basis. Pengukuran tidak langsung dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu (1) metode melalui pendekatan asumsi; (2) metode *location quotient*; (3) metode kombinasi (1) dan (2); dan (4) metode kebutuhan minimum (Budiharsono, 2001).

Menurut Tarigan (2004), metode LQ adalah membandingkan porsi lapangan kerja atau nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah yang dibandingkan dengan porsi lapangan kerja atau nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional. Asumsi yang digunakan adalah bahwa penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat nasional. Selain itu, permintaan wilayah akan suatu barang pertama-tama akan dipenuhi oleh hasil produksi wilayah itu sendiri, jika jumlah yang diminta melebihi jumlah produksi wilayah, maka kekurangannya diimpor. Sebaliknya, produksi produksi yang dihasilkan terlebih dulu ditujukan untuk konsumsi lokal dan diekspor ke luar wilayah apabila terjadi surplus produksi. Apabila LQ kurang dari satu, maka wilayah yang bersangkutan harus mengimpor,

sedangkan jika nilai LQ lebih dari satu maka wilayah tersebut dapat melakukan ekspor.

Metode LQ banyak dikritik karena didasarkan atas asumsi bahwa produktivitas rata-rata atau konsumsi rata-rata antar wilayah adalah sama. Bisa saja dari suatu wilayah yang lapangan kerjanya untuk sektor 1 rendah, tetapi total produksinya lebih tinggi. Perbedaan pengklasifikasian dari sektor kegiatan ekonomi yang mungkin berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Masalah lain yang perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan terjadinya perhitungan ganda (*double-counting*) jika di suatu daerah terdapat banyak pekerja yang berasal dari daerah lain sebagai pelaju (Tarigan, 2004).

Analisis LQ merupakan suatu alat analisis untuk menunjukkan basis ekonomi suatu wilayah terutama dari kriteria kontribusi. Alat analisis ini juga dipakai untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Perhitungan basis tersebut menggunakan variabel PDRB wilayah atas suatu kegiatan dalam struktur ekonomi wilayah (Tarigan, 2004).

Budiharsono (2001) menyatakan bahwa metode *Location Quotient* (LQ) merupakan perbandingan antara pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan (tenaga kerja) total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor i

pada tingkat nasional terhadap pendapatan (tenaga kerja) nasional. Hal tersebut secara sistematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$LQ_i = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Dimana :

v_i : tenaga kerja atau pendapatan sektor i pada tingkat wilayah

v_t : tenaga kerja atau pendapatan total wilayah

V_i : tenaga kerja atau pendapatan sektor i nasional

V_t : tenaga kerja atau pendapatan total nasional

Menurut Tarigan (2004) dari rumus di atas ada 3 kategori hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ) dalam perekonomian daerah, yaitu: Jika nilai $LQ > 1$, maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi lebih berspesialisasi dibandingkan dengan wilayah referensi. Artinya, sektor tersebut dalam perekonomian daerah di wilayah studi memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai sektor basis. Jika nilai $LQ < 1$, maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi kurang berspesialisasi dibandingkan dengan wilayah referensi. Sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor nonbasis. Jika nilai $LQ = 1$, maka sektor yang bersangkutan baik di wilayah studi maupun di wilayah referensi memiliki peningkatan.

G. *Shift Share*

Analisis *Shift Share* menganalisis perubahan berbagai indikator kegiatan ekonomi, dari hasil ini analisis ini akan diketahui bagaimana perkembangan suatu sektor di suatu wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya, apakah bertumbuh cepat atau lamban. Hasil analisis ini juga dapat menunjukkan bagaimana perkembangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya, apakah bertumbuh cepat atau lambat. Dalam analisis ini diasumsikan bahwa perubahan tenaga kerja/produksi di suatu wilayah antara tahun dasar dengan tahun akhir analisis dibagi menjadi tiga komponen pertumbuhan, yaitu: komponen pertumbuhan nasional (*national growth component*) disingkat PN, komponen pertumbuhan proporsional (*proportional or industrial mix growth component*) disingkat PP dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (*regional share growth component*) disingkat PPW (Budiharsono, 2001).

Komponen pertumbuhan nasional adalah perubahan kesempatan kerja atau produksi suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan kesempatan kerja atau produksi nasional secara umum, perubahan kebijakan ekonomi nasional, atau perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian semua sektor dan wilayahnya (Budiharsono, 2001).

Komponen pertumbuhan proporsional tumbuh karena perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan

bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri (misalnya, kebijakan perpajakan, subsidi, dan *price support*) dan perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar (Budiharsono, 2001).

Komponen pertumbuhan pangsa wilayah timbul karena peningkatan atau penurunan PDRB atau kesempatan kerja dalam suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial dan ekonomi serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah tersebut (Budiharsono, 2001).

Ketiga komponen pertumbuhan di atas secara matematik dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\Delta Y_{ij} = PN_{ij} + PP_{ij} + PPW_{ij}$$

dimana:

ΔY_{ij} = perubahan dalam produksi sektor *i* pada kabupaten ke *j*,

PN_{ij} = pertumbuhan nasional produksi sektor *i* pada kabupaten ke *j*,

PP_{ij} = pertumbuhan proporsional produksi sektor *i* pada kabupaten ke *j*

PPW_{ij} = pertumbuhan pangsa wilayah produksi sektor *i* pada kabupaten ke *j*

H. Strategi Pengembangan

Menurut Rangkuti (2000), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan yang didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (*strengths*)

dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Lingkungan eksternal dan internal suatu perusahaan terkait erat dalam kelangsungan kegiatan dan keberhasilan kinerja perusahaan. Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang tidak dapat dikontrol, tetapi dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan, sedangkan lingkungan internal adalah lingkungan dalam perusahaan yang dapat dikontrol, sehingga merupakan strategi keunggulan perusahaan (Rangkuti, 2000). Keterkaitan faktor internal dan eksternal dapat digambarkan dalam bentuk matriks SWOT. Matriks SWOT merupakan suatu alat untuk meringkas faktor-faktor strategis perusahaan yang menggambarkan peluang dan ancaman eksternal, serta pertemuan dengan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, untuk menghasilkan empat kelompok kemungkinan alternatif strategi.

I. Kerangka Konseptual

Perbedaan karakteristik fisik dan non fisik yang dimiliki masing-masing daerah merupakan potensi yang menjadi asset untuk pengembangan pembangunan wilayah. Perencanaan regional dimaksudkan agar semua daerah dapat melaksanakan pembangunan secara proporsional dan merata, sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Karakteristik fisik yang ada di antaranya adalah sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi dan kelembagaan

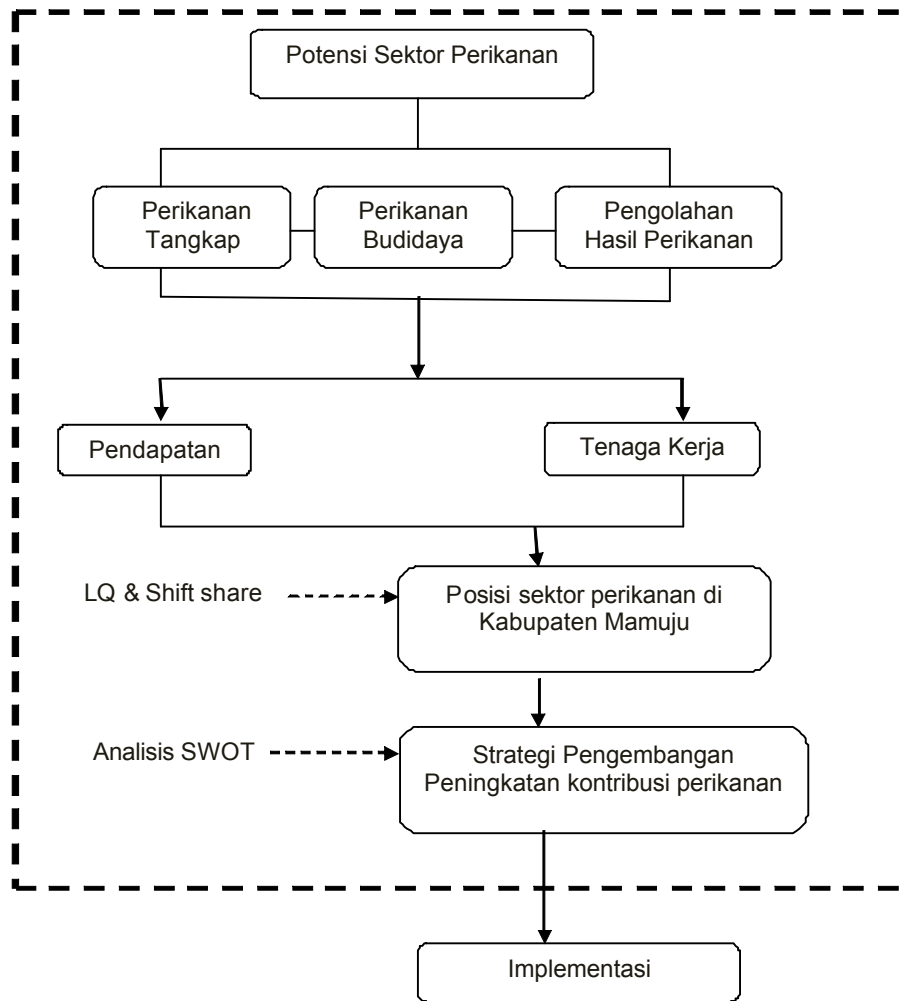
perlu digerakkan untuk peningkatan produksi dan produktivitas, sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan wilayah (PDRB) dan kesempatan kerja dalam rangka pembangunan wilayah. Pengembangan potensi sumberdaya alam diprioritaskan pada sektor atau komoditas yang dianggap memiliki peluang bersaing dalam era pasar global. Salah satu sektor yang signifikan dengan pengembangan potensi sumberdaya adalah sektor perikanan dan kelautan yang di dalamnya terbagi menjadi tiga yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan.

Pentingnya pengembangan sektor perikanan dan kelautan juga dapat dilihat dari pengaruhnya yang cukup besar terhadap kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Mamuju. Sektor perikanan dan kelautan masih merupakan lapangan usaha yang banyak diminati dan menjadi sumber penghasilan untuk kehidupan keluarga.

Salah satu cara untuk mengetahui posisi sektor perikanan di Kabupaten Mamuju adalah dengan menggunakan, metode analisis *Location Quotient* (LQ) dan *shift share*. LQ dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu sektor ekonomi di suatu daerah termasuk sektor basis atau non basis dalam periode tertentu. Metode LQ adalah membandingkan porsi lapangan kerja atau pendapatan untuk sektor tertentu di daerah yang lebih sempit, dibandingkan dengan porsi lapangan kerja atau pendapatan untuk sektor yang sama secara nasional (wilayah yang lebih luas). *Shift share* digunakan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan sektor perikanan di Kabupaten Mamuju.

Dalam penelitian ini, indikator yang akan digunakan adalah pendapatan wilayah (PDRB) dan tenaga kerja. Penentuan indikator tersebut berdasarkan pada pentingnya peranan masing-masing indikator terhadap pembangunan wilayah di Kabupaten Mamuju. Peningkatan pendapatan wilayah penting dilakukan dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penyerapan tenaga kerja juga merupakan faktor penting dalam pembangunan wilayah, karena terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Identifikasi sektor basis dan non basis akan menggambarkan struktur ekonomi wilayah Kabupaten Mamuju baik secara sektoral maupun regional yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan selanjutnya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan strategi pengembangan sektor perikanan dan kelautan. Untuk memahami lebih jelasnya mengenai alur pikir di dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Strategi Peningkatan Kontribusi Perikanan Terhadap Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Mamuju

Keterangan : ----- = ruang lingkup penelitian